



Pameran Kuliner Nusantara

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koirinbang, Rachmat Gobel, mencoba salah satu produk usaha makanan yang merupakan solusi dan kekuatan kebangkitan ekonomi nasional. Pameran berjuluk Adira Nusantara 2022 merupakan pameran gastronomi, kuliner, dan produk olahan Nusantara. Pameran bertema Cita Rasa Indonesia untuk Dunia itu diikuti para pengusaha ternama dan produk olahan pangan seperti pengangan dan masakan.

INFLASI PANGAN MENGANCAM

BI: Ekonomi Belum Pulih Total

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ekonomi nasional belum pulih total, kendati tumbuh impresif sebesar 5,44% secara tahunan kuartal II-2022.

Pertumbuhan itu belum maksimal, lantaran dibayangi risiko inflasi global.

Oleh Triyan Pangastuti

Ekonomi memang tumbuh tinggi, sebesar 5,44% kuartal II lalu. Memang, rakyat sudah bisa makan enak saat Ramadan, setelah sebelumnya tidak bisa, karena ada Covid-19. Kemudian, masyarakat juga sudah bisa berpergian, sudah sehat, dan sedang senang-senangnya. Tetapi, ini belum pulih benar," ungkap Perry dalam peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (10/8).

Di sampaikan, berbagai risiko global patut diwaspadai, termasuk laju inflasi. Hingga akhir Juli 2022, inflasi umum mencapai 4,94%, didorong

inflasi harga pangan sebesar 10,4%. "Inflasi pangan adalah masalah perut, rakyat, dan masalah kesejahteraan," kata dia.

Perry mengatakan, tensi geopolitik Rusia dan Ukraina menyebabkan lonjakan harga komoditas energi dan pangan dalam rantai perdagangan global. Hal ini berdampak langsung terhadap masyarakat yang tercermin pada meningkatnya inflasi pangan pada periode Juli.

"Rusia dan Ukraina merupakan pemain 20% energi dan pangan dalam perdagangan global. Akibat perang, harga dua komoditas itu naik," kata dia.

Dengan kondisi tersebut, dia menambahkan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mengenda-



Perry Warjiyo

likan inflasi pangan di dalam negeri. Apalagi Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi langsung kepada para menteri terkait untuk segera mengendalikan inflasi dalam negeri serta memenuhi pasokan dalam negeri.

Lebih lanjut Perry mengatakan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pangan menjadi sangat penting, agar Indonesia terus maju melalui ke arah visi Indonesia Maju. Apabila harga pangan terkendali, dia yakin rakyat akan sejahtera.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Juli 2022 mencapai 0,64% secara bulanan, naik dibandingkan bulan sebelumnya 0,61%. Alhasil, inflasi IHK secara tahunan mencapai 4,94%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 4,35%.

"Harusnya, inflasi pangan tidak boleh melebihi 5% atau paling tinggi 6%. Ingat, inflasi pangan itu masalah perut rakyat, dan masuk kesejahteraan. Jadi, ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah sosial," ucap dia.

Dengan demikian, dia mengajak semua pihak saling berkoordinasi dan berkollaborasi untuk mengendalikan inflasi pangan ke level seharusnya, berkisar 5-6%. Sebab, inflasi pangan yang meningkat akan memberi beban tambahan kepada 20% dari komposisi pengeluaran masyarakat bahwa atau sekitar 40-60% dari bobot pengeluaran mereka.

"Oleh karena itu, segera lakukan operasi pasar agar harga cabai, bawang, telur daging segera turun, sedangkan harga minyak goreng yang sudah turun, tidak naik lagi," tegaskan dia.

Perry Warjiyo menambahkan, ekonomi global saat ini menuju fase stagflasi, bahkan resesi. Hal ini disebabkan ketidakpastian terus meningkat, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi terkerek, seiring lonjakan harga pangan dan energi.

"Perlu saya sampaikan, ekonomi dunia sedang menurun, menuju stagflasi atau resesi di berbagai negara," ujar dia.

Menyikapi situasi tersebut, BI terus berupaya menahan laju inflasi, dengan meningkatkan kolaborasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui operasi pasar hingga program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

Selanjutnya, Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anton Henranta menyatakan, BI berperluang menaikkan suku bunga acuan, apabila inflasi inti menyentuh 3%. Sementara itu, Juli 2022, inflasi inti tercatat 2,86% secara tahunan.

Pembangunan 13 PSN Baru akan Selesai Tepat Waktu dan Sasaran

JAKARTA – Pembangunan 13 proyek strategis nasional (PSN) baru akan selesai tepat waktu dan dapat sasaran. Proyek-proyek itu akan berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia, baik secara regional maupun nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, untuk mencapai tujuan itu, penanggung jawab proyek kerja sama (PPJK) PSN perlu melengkapi berbagai hal penting, meliputi rencana aksi proyek sampai semester I-2024, *milestone* proyek per tahun, dan isu-isu kritis yang perlu ditindaklanjuti.

"Hal itu menjadi dasar bagi kita untuk meneliti dan melihat apa saja yang harus dilakukan," ujar Wahyu, Rabu (10/8).

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) itu menjelaskan ke-13 PSN baru ini, yakni Palapa Ring Integrasi di sektor teknologi, pembangunan kelapa dalam dan industri turunannya di Papua Barat, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djunda/Jatiulhu II di DKI Jakarta dan Jawa Barat, proyek Pariwisata Seribu Puluhan Kepulauan Seribu, infrastruktur kereta api logistik di Kalimantan Timur, pembangunan kawasan industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) di Sulawesi Tenggara, pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Kemudian, pembangunan Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah

Bendungan Rukoh di Aceh, proyek PLTS skala besar di Kepulauan Riau, integrasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo. Selanjutnya, ada tiga proyek smelter, yang meliputi smelter terintegrasi PT Vale Indonesia Tbk di Bahodopi di Sulawesi Tengah, smelter terintegrasi Vale Indonesia di Pomala, dan smelter nikel baterai listrik di Halmahera Timur, Maluku Utara untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 13 PSN

baru yang tersebut di berbagai wilayah Indonesia ini mencapai total investasi

Rp 100 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 80 triliun dialokasikan untuk proyek

infrastruktur dan Rp 20 triliun untuk

investasi dalam produksi dan teknologi.

Lebih lanjut Perry mengatakan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pangan menjadi sangat penting, agar Indonesia terus maju melalui ke arah visi Indonesia Maju. Apabila harga pangan terkendali, dia yakin rakyat akan sejahtera.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Juli 2022 mencapai 0,64% secara bulanan, naik dibandingkan bulan sebelumnya 0,61%. Alhasil, inflasi IHK secara tahunan mencapai 4,94%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 4,35%.

"Harusnya, inflasi pangan tidak boleh melebihi 5% atau paling tinggi 6%. Ingat, inflasi pangan itu masalah

perut rakyat, dan masuk kesejahteraan. Jadi, ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah sosial," ucap dia.

Dengan demikian, dia mengajak semua pihak saling berkoordinasi dan berkollaborasi untuk mengendalikan inflasi pangan ke level seharusnya, berkisar 5-6%. Sebab, inflasi pangan yang meningkat akan memberi beban tambahan kepada 20% dari komposisi pengeluaran masyarakat bahwa atau sekitar 40-60% dari bobot pengeluaran mereka.

"Oleh karena itu, segera lakukan operasi pasar agar harga cabai, bawang, telur daging segera turun, sedangkan harga minyak goreng yang sudah turun, tidak naik lagi," tegaskan dia.

Perry Warjiyo menambahkan, ekonomi global saat ini menuju fase stagflasi, bahkan resesi. Hal ini disebabkan ketidakpastian terus meningkat, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi terkerek, seiring lonjakan harga pangan dan energi.

"Perlu saya sampaikan, ekonomi dunia sedang menurun, menuju stagflasi atau resesi di berbagai negara," ujar dia.

Menyikapi situasi tersebut, BI terus berupaya menahan laju inflasi, dengan meningkatkan kolaborasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui operasi pasar hingga program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

Selanjutnya, Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anton Henranta menyatakan, BI berperluang menaikkan suku bunga acuan, apabila inflasi inti menyentuh 3%. Sementara itu, Juli 2022, inflasi inti tercatat 2,86% secara tahunan.

Lebih lanjut Perry mengatakan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pangan menjadi sangat penting, agar Indonesia terus maju melalui ke arah visi Indonesia Maju. Apabila harga pangan terkendali, dia yakin rakyat akan sejahtera.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Juli 2022 mencapai 0,64% secara bulanan, naik dibandingkan bulan sebelumnya 0,61%. Alhasil, inflasi IHK secara tahunan mencapai 4,94%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 4,35%.

"Harusnya, inflasi pangan tidak boleh melebihi 5% atau paling tinggi 6%. Ingat, inflasi pangan itu masalah

perut rakyat, dan masuk kesejahteraan. Jadi, ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah sosial," ucap dia.

Dengan demikian, dia mengajak semua pihak saling berkoordinasi dan berkollaborasi untuk mengendalikan inflasi pangan ke level seharusnya, berkisar 5-6%. Sebab, inflasi pangan yang meningkat akan memberi beban tambahan kepada 20% dari komposisi pengeluaran masyarakat bahwa atau sekitar 40-60% dari bobot pengeluaran mereka.

"Oleh karena itu, segera lakukan operasi pasar agar harga cabai, bawang, telur daging segera turun, sedangkan harga minyak goreng yang sudah turun, tidak naik lagi," tegaskan dia.

Perry Warjiyo menambahkan, ekonomi global saat ini menuju fase stagflasi, bahkan resesi. Hal ini disebabkan ketidakpastian terus meningkat, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi terkerek, seiring lonjakan harga pangan dan energi.

"Perlu saya sampaikan, ekonomi dunia sedang menurun, menuju stagflasi atau resesi di berbagai negara," ujar dia.

Menyikapi situasi tersebut, BI terus berupaya menahan laju inflasi, dengan meningkatkan kolaborasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui operasi pasar hingga program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

Selanjutnya, Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anton Henranta menyatakan, BI berperluang menaikkan suku bunga acuan, apabila inflasi inti menyentuh 3%. Sementara itu, Juli 2022, inflasi inti tercatat 2,86% secara tahunan.

Lebih lanjut Perry mengatakan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pangan menjadi sangat penting, agar Indonesia terus maju melalui ke arah visi Indonesia Maju. Apabila harga pangan terkendali, dia yakin rakyat akan sejahtera.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Juli 2022 mencapai 0,64% secara bulanan, naik dibandingkan bulan sebelumnya 0,61%. Alhasil, inflasi IHK secara tahunan mencapai 4,94%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 4,35%.

"Harusnya, inflasi pangan tidak boleh melebihi 5% atau paling tinggi 6%. Ingat, inflasi pangan itu masalah

perut rakyat, dan masuk kesejahteraan. Jadi, ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah sosial," ucap dia.

Dengan demikian, dia mengajak semua pihak saling berkoordinasi dan berkollaborasi untuk mengendalikan inflasi pangan ke level seharusnya, berkisar 5-6%. Sebab, inflasi pangan yang meningkat akan memberi beban tambahan kepada 20% dari komposisi pengeluaran masyarakat bahwa atau sekitar 40-60% dari bobot pengeluaran mereka.

"Oleh karena itu, segera lakukan operasi pasar agar harga cabai, bawang, telur daging segera turun, sedangkan harga minyak goreng yang sudah turun, tidak naik lagi," tegaskan dia.

Perry Warjiyo menambahkan, ekonomi global saat ini menuju fase stagflasi, bahkan resesi. Hal ini disebabkan ketidakpastian terus meningkat, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi terkerek, seiring lonjakan harga pangan dan energi.

"Perlu saya sampaikan, ekonomi dunia sedang menurun, menuju stagflasi atau resesi di berbagai negara," ujar dia.

Menyikapi situasi tersebut, BI terus berupaya menahan laju inflasi, dengan meningkatkan kolaborasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui operasi pasar hingga program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

Selanjutnya, Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anton Henranta menyatakan, BI berperluang menaikkan suku bunga acuan, apabila inflasi inti menyentuh 3%. Sementara itu, Juli 2022, inflasi inti tercatat 2,86% secara tahunan.

Lebih lanjut Perry mengatakan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pangan menjadi sangat penting, agar Indonesia terus maju melalui ke arah visi Indonesia Maju. Apabila harga pangan terkendali, dia yakin rakyat akan sejahtera.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Juli 2022 mencapai 0,64% secara bulanan, naik dibandingkan bulan sebelumnya 0,61%. Alhasil, inflasi IHK secara tahunan mencapai 4,94%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 4,35%.

"Harusnya, inflasi pangan tidak boleh melebihi 5% atau paling tinggi 6%. Ingat, inflasi pangan itu masalah

perut rakyat, dan masuk kesejahteraan. Jadi, ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah sosial," ucap dia.

Dengan demikian, dia mengajak semua pihak saling berkoordinasi dan berkollaborasi untuk mengendalikan inflasi pangan ke level seharusnya, berkisar 5-6%. Sebab, inflasi pangan yang meningkat akan memberi beban tambahan kepada 20% dari komposisi pengeluaran masyarakat bahwa atau sekitar 40-60% dari bobot pengeluaran mereka.

"Oleh karena itu, segera lakukan operasi pasar agar harga cabai, bawang, telur daging segera turun, sedangkan harga minyak goreng yang sudah turun, tidak naik lagi," tegaskan dia.

Perry Warjiyo menambahkan, ekonomi global saat ini menuju fase stagflasi, bahkan resesi. Hal ini disebabkan ketidakpastian terus meningkat, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan inflasi terkerek, seiring lonjakan harga pangan dan energi.

"Perlu saya sampaikan, ekonomi dunia sedang menurun, menuju stagflasi atau resesi di berbagai negara," ujar dia.

Menyikapi situasi tersebut, BI terus berupaya menahan laju inflasi, dengan meningkatkan kolaborasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui operasi pasar hingga program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

Selanjutnya, Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anton Henranta menyatakan, BI berperluang menaikkan suku bunga acuan, apabila inflasi inti menyentuh 3%. Sementara itu, Juli 2022, inflasi inti tercatat 2,86% secara tahunan.

Lebih lanjut Perry mengatakan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pangan menjadi sangat penting, agar Indonesia terus maju melalui ke arah visi Indonesia Maju. Apabila harga pangan terkendali, dia yakin rakyat akan sejahtera.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Juli 2022 mencapai 0,64% secara bulanan, naik dibandingkan bulan sebelumnya 0,61%. Alhasil, inflasi IHK secara tahunan mencapai 4,94%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 4,35%.

"Harusnya, inflasi pangan tidak boleh melebihi 5% atau paling tinggi 6%. Ingat, inflasi pangan itu masalah

perut rakyat, dan masuk kesejahteraan. Jadi, ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah sos